



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : STAF KHUSUS MENTERI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RIEFKY PRANATA HUTAMA R
- Jabatan** : STAF KHUSUS MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG POLITIK DAN KEBIJAKAN
- NHK** : 942899

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/95 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.230.000.000

- MOBIL, TOYOTA ALPHARD G Tahun 2016, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 400.000.000
- MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
- MOBIL, MERCEDEZ BENZ 320 E Tahun 1991, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
- MOBIL, BYD SEAL Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 270.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.452.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.635.000.000

Sub Total Rp. 5.187.000.000

III. HUTANG Rp. 1.980.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.207.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.